



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 77 /Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi III Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 disebutkan bahwa Pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD, penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas dan Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 77 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 10 Maret 2022

---

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana Pengawasan Intern pemerintah harus mampu merespon secara cepat dan tepat dari berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Program kerja pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) setiap tahun perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berpedoman terhadap ketentuan tentang kebijakan bidang pengawasan dari Pemerintah.

Kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan harapan pemangku kepentingan serta tujuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar kegiatan pengawasan yang diselenggarakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan pada area tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Terkait dengan keselarasan kegiatan pengawasan intern dengan harapan pemangku kepentingan dan tujuan Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis dan rencana pengawasan tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah merupakan salah satu tahapan penting karena kedua perencanaan tersebut menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah dalam suatu periode tertentu. Untuk memenuhi persyaratan dalam SAIPi paragraf 3010, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yaitu melalui :

- a. Pemeriksaan berkala, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, *Joint Audit* dan asistensi;
- b. Pengujian terhadap Laporan berkala dari SKPD/Unit kerja
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan/program dari SKPD/Unit kerja
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa .

## II. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2022 adalah :

- a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program kerja pengawasan
- b. Mendorong terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Unit Kerja / SKPD se Kabupaten Magetan
- c. Mewujudkan ketaatan dan akuntabilitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

## III. SASARAN

Sasaran dari Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2022 adalah :

- a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitas yang telah tercapai.

- b. Kualitatif, yaitu sampai sejauhmana mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
- c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.
- d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh hasil dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dicapai dengan baik sesuai anggaran yang ada.

#### IV. RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

Ruang Lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022 antara lain :

- 1. Audit terdiri atas :
  - 1) Audit Keuangan
  - 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu
  - 3) Audit Kinerja
  - 4) Audit Kepatuhan
- 2. Reviu
- 3. Evaluasi
- 4. Pemantauan/Monitoring
- 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain :
  - a) Pendampingan audit BPK, BPKP, Irjen Kementerian, Inspektorat Provinsi dan lain lain
  - b) Penyusunan Juknis Pengawasan
  - c) *Workshop/Bimtek*
  - d) Penyusunan Laporan
  - e) Rapat Kerja Intern
  - f) Koordinasi pembinaan dan Pengawasan
  - g) Dan lain lain

#### V. SASARAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, clean goverment dan pelayanan publik meliputi :
  1. Pengawasan Operasional
  2. Pengawasan Kinerja
  3. Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah
  4. Pengawasan atas pengelolaan Barang Daerah
  5. Pengawasan atas pengelolaan Anggaran Pendidikan
  6. Pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa
  7. Penguatan sistem pengendalian intern
  8. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
  
- b. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada :
  1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
    - a) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
    - b) Pajak dan retribusi daerah;
    - c) Hibah dan bantuan sosial;
    - d) Belanja barang dan jasa;
    - e) Belanja modal; dan
    - f) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
  2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
  3. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
  4. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.
  
- c. Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :
  1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
  4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  5. Reviu Laporan Kinerja
  6. Reviu Penyerapan Anggaran



7. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
  8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
    - a) Pemeriksaan Investigatif;
    - b) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
    - c) Penghitungan kerugian keuangan Negara
  9. Pemeriksaan serentak kas opname;
  10. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan Negara bukan pajak
  11. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  12. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  13. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- d. Kegiatan pengawasan prioritas Nasional, meliputi :
1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
  2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah
  4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsif gender);
  5. Dana Desa:
    - a) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
    - b) Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan pemeriksaan dana desa;
  6. Bantuan Operasional Sekolah:
    - a) Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Sekolah; dan
    - b) Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah.
- e. Pengawasan reformasi dan birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Magetan, meliputi:
1. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi
    - a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
    - b) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;
    - c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
    - d) Penilaian internal Zona Integritas;
    - e) Penanganan benturan kepentingan;
    - f) Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
    - g) Penanganan pengaduan masyarakat.
  3. Evaluasi pelayanan publik.
- f. Kegiatan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten Magetan, meliputi :
1. Survey penilaian integritas;
  2. Penanganan laporan gratifikasi;
  3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
  4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.
- g. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) , dengan fokus
1. Pemeriksaan investigatif
  2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa
  3. Penerapan sistem manajemen resiko
  4. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; dan
  5. Sertifikasi profesi
- h. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan meliputi :
1. Pendampingan audit BPK, BPKP, Irjen Kementerian, Inspektorat Provinsi dan lain lain
  2. Penyusunan Juknis Pengawasan
  3. *Workshop*/Bimtek
  4. Penyusunan Laporan
  5. Rapat Kerja Intern
  6. Koordinasi pembinaan dan Pengawasan
  7. Dan lain lain

## VI. PENUTUP

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 merupakan acuan di dalam melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan bidang pengawasan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas menejemen pengawasan pemerintah daerah. Agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal maka diperlukan kedisiplinan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengawasan adalah sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten Signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ /Kept/403.013/2022

TANGGAL : \_\_\_\_\_

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2022**

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
<b>JANUARI</b>								
1	Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah (Pariwisata, Perhubungan, Disnakan)	Evaluasi	BPPKAD	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
2	Pendampingan Pemetaan Risiko	Pemantauan	3 OPD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
3	Monev pengelolaan BOS SMP	Monev	Dikpora	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
4	Progres fisik DAK yang terlambat Tahun 2021	Monev	Dikpora	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
5	Dinas THPKP	Monev Hibah	Dinas THPKP	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
6	Inventarisasi data penunjang Kapabilitas APIP	Pengawasan lainnya	Inspektorat	3	7	2.805.000	1	IRBAN III
7	Pemantauan tindak lanjut	Pemantauan	15 OPD	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
8	Pemantauan Manajemen Risiko	Pemantauan	6 OPD	5	6	6.630.000	1	IRBAN IV
9	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
10	Pemeriksaan Investigatif/PKKN	PDTT	1 OPD	5	3	3.780.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Pemantauan pembangunan Reformasi Birokrasi (RB)	Pemantauan	46 OPD	6	7	8.970.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>FEBRUARI</b>								
1	Pendampingan Pemetaan Risiko	Pemantauan	2 OPD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
2	Evaluasi Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021	Evaluasi	BPPKAD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
3	Belanja modal pasar	Audit	Disperindag	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
4	Dinas Lingkungan Hidup	Audit keuangan	Fisik 3 titik	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
5	Dinas Perkim	Audit keuangan	Dinas Perkim	10	7	14.530.000	1	IRBAN III

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
6	Reviu LPPD 2021	Reviu	56 OPD	5	12	6.190.000	1	IRBAN III
7	Pemantauan Manajemen Risiko	Pemantauan	7 OPD	5	6	6.625.000	1	IRBAN IV
8	Audit aspek keuangan pada Dinas Perhubungan	Audit	Dinas Perhubungan	5	6	6.625.000	1	IRBAN IV
9	Reviu LKPD 2021	Reviu	56 OPD	5	12	6.190.000	1	IRBAN I
10	PDTT	PDTT	1 OPD	5	4	3.780.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Pemantauan pembangunan Reformasi Birokrasi (RB)	Pemantauan	46 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
12	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	9 OPD	5	7	4.150.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>MARET</b>								
1	Reviu LKjIP Kab. Magetan TA 2022	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Evaluasi Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2021	Evaluasi	BPPKAD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
3	Kecamatan Bendo	Audit aspek keuangan	Kecamatan Bendo	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
4	Kecamatan Nguntoronadi	Audit aspek keuangan	Kec. Nguntoronadi	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
5	Monev BOK dan JKN puskesmas	Monev	Dinkes	20	7	28.430.000	1	IRBAN II
6	Dispendukcapil	Audit Kinerja	Dispendukcapil	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
7	Dinas Lingkungan Hidup	probity	Ipal Sengolangu	10	7	12.630.000	1	IRBAN III
8	Kapabilitas APIP	Pengawasan lainnya	Inspektorat	3	7	3.000.000	1	IRBAN III
9	Audit aspek keuangan pada Dinas Perhubungan	Audit	Dinas Perhubungan	5	6	6.630.000	1	IRBAN IV
10	Audit aspek keuangan pada Dinas Pariwisata	Audit aspek keuangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
11	Pemantauan Tindak lanjut LHP	Pemantauan	15 OPD	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
12	Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	10 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
13	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
14	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Evaluasi	9 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>APRIL</b>								
1	Reviu RKPD 2023	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Bagian Adbang	Audit aspek keuangan	Bagian Adbang	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
3	Bakebangpol	Audit aspek keuangan	Bakebangpol	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
4	Bagian Prokopim	Audit Kepatuhan	Bagian Prokopim	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
5	Bagian Kesra	Audit Kepatuhan	Bagian Kesra	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
6	Bagian Umum	Audit Kepatuhan	Bagian Umum	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
7	Bagian Pemerintahan	Audit Keuangan	Bagian Pemerintahan	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Bagian Perekonomian dan SDA	Audit aspek keuangan	Bagian Perekonomian dan SDA	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
9	Bagian Hukum	Audit aspek keuangan	Bagian Hukum	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
10	Verifikasi LHKASN	Verifikasi	54 OPD	10	7	6.670.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Evaluasi	9 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
12	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>MEI</b>								
1	Audit Kinerja Manajemen Aset Daerah	Audit Kinerja	BPPKAD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
2	monev target peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro	Monev	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10	7	14.530.000	1	IRBAN II

<b>NO</b>	<b>SASARAN PENGAWASAN</b>	<b>JENIS PENGAWASAN</b>	<b>OPD</b>	<b>HARI PENGAWASAN</b>	<b>JUMLAH PERSONIL</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN</b>	<b>IRBAN PENGAMMPU</b>
3	monev pencapaian IKU Bupati yang diampu oleh Dinas PMD	Monev	Dinas PMD	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
4	RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
5	Ipal Sengolangu	probity	Dinas Lingkungan Hidup	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
6	Kapabilitas APIP Penyusunan PKPT Berbasis resiko	Pengawasan lainnya	Inspektorat	10	7	6.670.000	1	IRBAN III
7	Audit Aspek Keuangan pada Dinas Peternakan	Audit aspek keuangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	5	6	6.630.000	1	IRBAN IV
8	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	PDTT	1 OPD	5	4	4.730.000	1	IRBAN INVESTIGASI
9	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI)	Pendampingan	56 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
10	Verifikasi LHKASN	Verifikasi	54 OPD	10	7	6.670.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>JUNI</b>								
1	Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2018- 2023	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Reviu atas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
3	Audit Kinerja Manajemen Aset Daerah	Audit Kinerja	BPPKAD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
4	Audit aspek keuangan desa di Kecamatan Sidorejo	Audit aspek keuangan	2 Desa	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
5	reviu aset eks pnpm pedesaan dalam rangka menjadi bumdesma	Reviu	Dinas PMD	10	7	6.670.000	1	IRBAN II
6	NSPK, SPM, SOP Poli Rawat Jalan RSUD	Audit Kinerja	RSUD	10	7	14.530.000	1	IRBAN II

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
7	Monev desa di Kecamatan Kartoharjo	Monev	11 desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Monev desa di Kecamatan Panekan	Monev	12 desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
9	Kapabilitas APIP	Pengawasan lainnya	Inspektorat	3	7	3.000.000	1	IRBAN III
10	Audit Aspek Keuangan pada Dinas Peternakan	Audit aspek keuangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	5	7	7.580.000	1	IRBAN IV
11	Evaluasi Tindak Lanjut LHP	Evaluasi	15 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
12	Pemantauan desa di Kecamatan Ngariboyo	Pemantauan	5 Desa	5	7	7.580.000	1	IRBAN IV
13	Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	10 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
14	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
15	Asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Pendampingan	46 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
16	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Evaluasi	9 OPD	3	7	4.800.000	1	IRBAN INVESTIGASI
17	Pengendalian Gratifikasi	Monev	5 OPD	2	7	2.630.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>JULI</b>								
1	Reviu P-RKPD 2022	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Reviu Rancangan KUAPPAS Tahun 2022	Reviu	56 OPD	3	15	7.487.500	1	Semua IRBAN
3	Audit aspek keuangan desa di Kec. Sidorejo	Audit aspek keuangan	2 Desa	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
4	Reviu HPS 10 paket strategis	reviu	3 OPD	5	6	3.397.500	1	IRBAN I
5	Reviu Renja 2023	reviu	56 Opd	5	15	8.575.000	1	IRBAN I
6	Monev desa di Kec. Takeran	Monev	12 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
7	Monev Kec. Takeran	Monev	kecamatan Takeran	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Pemantauan desa di Kec. Ngariboyo	Pemantauan	5 Desa	5	7	7.580.000	1	IRBAN IV



NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
9	Pemantauan Desa di Kecamatan Kawedanan	Pemantauan	5 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
10	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	PDTT	1 OPD	10	5	10.730.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Pengendalian Gratifikasi	Monev	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
12	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	56 OPD	5	15	8.575.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>AGUSTUS</b>								
1	Reviu P-Renja 2022	reviu	56 Opd	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Reviu RKA 2023	reviu	56 Opd	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
3	Monev capaian penagihan tunggakan pajak	Monev	BPPKAD	5	6	6.630.000	1	IRBAN I
4	Reviu Atas Rotasi Mutasi Promosi ASN	reviu	BKD	5	6	3.397.500	1	IRBAN I
5	Desa di Kecamatan Karangrejo	Monev	11 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
6	Kecamatan Karangrejo	Monev	Kecamatan Karangrejo	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
7	Kecamatan Karas	Monev	11 desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Ipal Sengolangu	probity	Dinas Lingkungan Hidup	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
9	Pemantauan Desa di Kecamatan Poncol	Pemantauan	5 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
10	Pemeriksaan Investigatif	PDTT	2 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	PDTT	2 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
<b>SEPTEMBER</b>								
1	Reviu P-RKA 2022	reviu	56 Opd	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Reviu Dokumen KUA PPAS APBD Perubahan th. 2022	reviu	56 Opd	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
3	Reviu Atas Rotasi Mutasi Promosi ASN	reviu	BKD	5	6	3.397.500	1	IRBAN I
4	Reviu Kinerja UKPBJ	reviu	PBJ	10	6	5.535.000	1	IRBAN I
5	Desa di Kecamatan Lembeyan	Monev	9 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
6	Kecamatan Lembeyan	Monev	Kecamatan Lembeyan	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
7	Monev desa di Kecamatan Sukomoro	Monev	4 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Reviu	56 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
9	Pemantauan Desa di Kecamatan Barat	Pemantauan	5 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
10	Pemantauan Tindak Lanjut LHP	Pemantauan	15 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
11	Asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Pendampingan	46 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
12	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
13	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Evaluasi	9 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>OKTOBER</b>								
1	Reviu RKA SKPD TA 2023	Reviu	56 OPD	5	15	8.575.000	1	Semua IRBAN
2	Audit aspek keuangan pada Bappeda Litbang	Audit aspek keuangan	Bappeda Litbang	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
3	Kecamatan Nguntoronadi	Audit aspek keuangan	4 Desa	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
4	Desa di Kecamatan Plaosan	Monev	3 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
5	Kecamatan Plaosan	Monev	Kecamatan Plaosan	10	7	14.530.000	1	IRBAN II

<b>NO</b>	<b>SASARAN PENGAWASAN</b>	<b>JENIS PENGAWASAN</b>	<b>OPD</b>	<b>HARI PENGAWASAN</b>	<b>JUMLAH PERSONIL</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH LAPORAN</b>	<b>IRBAN PENGAMMPU</b>
6	Tempat Wisata Kebun Bunga Refugia	Audit Aspek Keuangan	Dinas TPHPKP	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
7	Dinas PPKB dan PPPA	Audit Kinerja	Dinas PPKB dan PPPA	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Evaluasi Pengadaan Barang Jasa PDAM	Evaluasi	PDAM	10	6	12.630.000	1	IRBAN IV
9	Reviu Kinerja BPRS	Reviu	BPRS	10	7	6.670.000	1	IRBAN IV
10	Perhitungan kerugian keuangan daerah (PDTT)	PDTT	5 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Monev Bagian Organisasi	Monev	Bagian Organisasi	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>NOVEMBER</b>								
1	Probity Audit 5 obyek	Probity	5 Opd	10	12	24.630.000	1	Semua IRBAN
2	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	Pengawasn Lainnya	56 Opd	10	12	10.465.000	1	IRBAN I
3	Dinas Sosial	Audit Aspek Keuangan	Dinas Sosial	10	7	14.530.000	1	IRBAN I
4	Monev pada Desa di Kec.Parang	Monev	12 Desa	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
5	Monev pada Kec.Parang	Monev	Kecamatan Parang	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
6	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Audit kepatuhan	DISNAKER	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
7	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)	Evaluasi	Dinas PPKB dan PPPA	10	7	14.530.000	1	IRBAN III
8	Audit aspek keuangan pada BPBD	Audit aspek keuangan	BPBD	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
9	Audit Aspek Keuangan pada Satpol PP	Audit aspek keuangan	SATPOL PP	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
10	Pemeriksaan Investigatif	PDTT	2 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
11	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	PDTT	1 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI

NO	SASARAN PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	OPD	HARI PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN	IRBAN PENGAMMPU
12	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
<b>DESEMBER</b>								
1	Audit aspek keuangan desa di Kecamatan Nguntoronadi	Audit aspek keuangan	4 Desa	10	6	12.630.000	1	IRBAN I
2	Dinas PUPR	Audit Kinerja	Dinas PUPR	20	6	24.630.000	1	IRBAN I
3	Monev capaian Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Monev	Dinas ARPUS	10	7	14.530.000	1	IRBAN II
4	Kinerja Perijinan	Reviu	DPMPSTP	10	7	6.670.000	1	IRBAN III
5	Pemantauan Tindak Lanjut LHP	Pemantauan	15 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
6	Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah	Evaluasi	Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Disnakan	10	7	14.530.000	1	IRBAN IV
7	Asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Pendampingan	46 OPD	10	7	14.530.000	1	IRBAN INVESTIGASI
8	Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	5 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI
9	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Evaluasi	9 OPD	5	7	7.580.000	1	IRBAN INVESTIGASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO